



KR-Surya Adi Lesmana

WARGA HUNTA BATUR: Pengendara melintas di hantap Batur Kepuharjo Cangkringan Sleman. Warga lereng Gunung Merapi yang tinggal di hantap ini tetap berkegiatan normal meskipun sering terdengar suara gemuruh dari puncak Merapi, Kamis (12/11).

Puluhan Lampu Terangi Jalur Evakuasi

SLEMAN (KR) - Dinas Perhubungan Sleman mulai memasang lampu penerangan di jalur evakuasi. Hal ini merupakan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Merapi di malam hari.

Plt Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Arip Pramana mengatakan, pemasangan lampu jalan dimulai sejak Selasa (10/11). Jalur evakuasi yang menjadi sasaran pemasangan lampu adalah jalur Srunen hingga Singlar di Kapanewon Cangkringan. Dalam pelaksanaannya, ada sekitar 20 lampu penerangan yang akan dipasang di jalur tersebut untuk jarak sekitar 150 meter. "Pemasangan lampu jalan ini berfungsi sebagai penerang bagi warga, untuk berjaga-jaga kalau erupsi terjadi di malam hari. Jalur evakuasi jalannya sudah terang sampai bawah," kata Arip di kantornya, Kamis (12/11).

Selain jalur Srunen hingga Singlar, Dishub Sleman juga telah memasang lampu di sekitar Padukuhan Plosokerep Umbulharjo Cangkringan. Setidaknya ada 5 titik yang menjadi target pemasangan

lampu jalan. Arip mengungkapkan, penambahan lampu jalan juga dilakukan di lingkungan barak pengungsian Balai Desa Glagaharjo. "Titik kumpul Padukuhan Kalitengah Lor dan titik kumpul Padukuhan Srunen juga telah dipasang lampu. Termasuk di kandang komunal Padukuhan Singlar, tempat ternak warga Kalitengah Lor dievakuasi," beber Arip.

Sehingga total pemasangan lampu ada 40 lampu. Daerah Turgo juga sudah ada lampu yang dilakukan Dishub Sleman bersama dengan warga. "Yang Turgo justru sebelum status Gunung Merapi dinaikkan sudah dipasang lampu," tandas Arip.

Ditambahkan, selama ini jalur evakuasi memang belum dilengkapi lampu penerangan. Namun dengan adanya peningkatan status Merapi dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III), Pemkab Sleman harus segera melakukan persiapan mitigasi. Dishub Sleman tidak mengesampingkan penerangan di jalur evakuasi. Namun yang menjadi prioritasnya adalah penerangan di sekitar permukiman. (Aha)-f

Pemkab Sleman Bakal Kehilangan 513 ASN

SLEMAN (KR) - Sebanyak 513 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sleman menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret 2021. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemkab Sleman Kunto Riyadi di Aula Kantor BKPP Sleman, Kamis (12/11).

Penyerahan SK tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya 17 perwakilan calon purna tugas yang hadir dan menerima SK secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan protokol kesehatan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Kepala BKPP Sleman Priyo Handoyo mengatakan, penyerahan SK secara simbolis kepada 17 perwakilan calon purna tugas, tidak mengurangi rasa hormat kepada para calon purna tugas. Selain penyerahan SK pensiun bagi ASN calon purna tugas, penyesuaian juga terjadi bagi CPNS tahun anggaran 2019 dengan agenda pengangkatannya diperkirakan menjadi bulan Desember 2020.

Sementara Kunto Riyadi berharap habisnya masa tugas atau pensiun bagi ASN tidak menjadi halangan untuk menjadi abdi negara dan masyarakat. "Masa purna tugas sebenarnya merupakan masa perpindahan dari satu rutinitas di suatu instansi dengan rutinitas di rumah dan masyarakat. Oleh karena itu, pensiun hendaknya dimaknai sebagai suatu awal untuk mengabdikan pada masyarakat dengan waktu yang lebih lama," katanya. (Has)-f

GELAR PAMERAN DI JCM

BSN Promosikan Produk Berstandar

SLEMAN (KR) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Indonesia Quality Expo (IQE) ke-8 Tahun 2020 di Jogja City Mall (JCM), Kamis (12/11) hingga Minggu (15/11). Diharapkan melalui IQE ini dapat membangkitkan optimisme dan perekonomian Indonesia.

Kepala BSN Kukuh S. Achmad mengatakan, tuntutan perlindungan bagi konsumen semakin menguat apalagi konsumen butuh jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan dan tentunya kualitas. "Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk menggerakkan hilirisasi atau komersialisasi hasil inovasi. Dan pameran ini merupakan suatu cara untuk mempromosikan produk yang tentunya berstandar," terangnya.

Kukuh menambahkan, Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah karena komitmen Pemerintah DIY terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini ditandai dengan diteri-



KR-Mahar Prastiwi

Pembukaan IQE ke-8 Tahun 2020 di Jogja City Mall.

manya penghargaan Tokoh Standardisasi 2019 Kategori Kepala Daerah kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Khusus di Yogyakarta ini, BSN mencatat produk unggulan di antaranya kerajinan kayu, perak, dan tekstil," beber Kukuh.

BSN juga menganugerahkan penghargaan SNI Award pada beberapa organisasi dan industri di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Per-

sero). IQE tahun ini diikuti 12 instansi baik dari pemerintah maupun swasta yang mengisi 30 unit.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri yang juga sebagai Ketua Panitia IQE 2020 menambahkan, para peserta pameran terdiri dari industri, lembaga penilaian kesesuaian, dan pemerintah daerah. "Produk-produk ber-SNI dipamerkan dan juga layanan informasi seputar standardisasi dan penilaian kesesuaian," imbuhnya. (Aha)-f

Puluhan Sekolah Disiapkan Sebagai Barak Pengungsian

SLEMAN (KR) - Untuk mengantisipasi penambahan pengungsi dalam jumlah banyak, Dinas Pendidikan Sleman menyiapkan gedung sekolah sebagai barak pengungsian di empat Kapanewon. Paling tidak ada 30 sekolah yang akan disiapkan sebagai barak pengungsian.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana menjelaskan, puluhan gedung sekolah yang akan dimanfaatkan sebagai barak pengungsian ini terdiri dari gedung TK, SD dan SMP di wilayah Kapanewon Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngeplak. Nantinya gedung sekolah ini bisa dimanfaatkan pengungsi manakala barak pengungsian yang disediakan sudah tidak mencukupi bagi jumlah pengungsi.

"Jika barak pengungsian Glagaharjo sudah tidak mencukupi, masih bisa menggunakan barak Gayam. Kemudian jika di barak Gayam tidak cukup, akan ditopang oleh SD Bronggang," terang Ery di kantornya, Kamis (12/11).

Hingga saat ini, sekolah yang sudah digunakan sebagai tempat pengungsi-

an baru di SD Muhammadiyah Cepitsari. Menggunakan 2 ruangan kelas dan 6 toilet yang ada di sekolah. Sedangkan bagi siswa yang berada di pengungsian barak Glagaharjo merupakan anak-anak yang rumahnya dalam radius 5 kilometer dari puncak Merapi. Namun mereka bersekolah di SD Srunen, SD Glagaharjo dan SD Muhammadiyah Cepitsari. "Kalau untuk sekolah belum ada yang terdampak," jelas Ery.

Pihak Dinas sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Namun Ery berharap pihak kalurahan akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan sekolah terkait. Sehingga pihak kalurahan juga harus ikut bertanggung jawab atas kebersihan serta keamanan aset sekolah. Termasuk sterilisasi seko-

lah karena ini masa pandemi sehingga hal itu harus dipikirkan juga. "Kami sudah panggil UPT di masing-masing kapanewon, untuk mengondisikan MoU dengan pihak kalurahan," tandas Ery.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman Joko Supriyanto tidak keberatan dengan adanya MoU yang dibuat oleh sekolah dan pihak kalurahan. Khususnya dalam penggunaan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian. Mengingat barak yang ada terjadi pembatasan, apalagi adanya kondisi pandemi seperti saat ini. "Kalau terkait pembersihan gedung usai dipakai, bisa dirembug. Itu bukan masalah berarti," tutur Joko.

Hingga saat ini daya tampung di barak Kalurahan Glagaharjo masih ada sisa 10 ruang yang bisa digunakan. Jika penuh, para pengungsi akan menggunakan barak Gayam di Umbulharjo. "Pemasangan sekat setinggi 160 sentimeter juga sudah dilakukan," pungkas Joko. (Aha)-f

ANTISIPASI ERUPSI MERAPI

Bawaslu Sarankan TPS Khusus di Barak Pengungsian

CANGKRINGAN (KR) - Tim Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Sleman menyarankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada di daerah rawan terdampak erupsi Merapi direlokasi ke barak pengungsian. Hal itu untuk menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada di daerah Gunung Merapi.

Anggota Bawaslu DIY Amir Nasirudin menjelaskan, jika memang kondisi Gunung Merapi masih berstatus Siaga, pihaknya menyarankan TPS di daerah rawan terdampak erupsi di pindah ke barak pengungsian.

"Kami sarankan untuk direlokasi ke barak peng-



KR-Saifullah Nur Ichwan

Tim Bawaslu DIY saat meninjau barak pengungsian.

ungsian saja untuk TPS yang rawan bencana. Hal itu akan kami koordinasikan dengan KPU Sleman," kata Amir saat berkunjung ke Barak Pengungsian Glagaharjo Cangkringan, kemarin.

Menurutnya, dikarenakan ini merupakan kondisi tanggap darurat, untuk perlakuannya supaya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Termasuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS

barak pengungsian. "Untuk beberapa TPS yang perlu direlokasi dikoordinasikan dengan kapanewon setempat. Tapi untuk pemilihan yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu bisa menyesuaikan perpindahan penduduk. Soalnya kalau bencana itu ada pengaturan khusus," terang Amir.

Untuk itu, Bawaslu menyarankan kepada KPU supaya mempersiapkan proses rencana relokasi TPS. Mengingat bencana erupsi Gunung Merapi ini tidak dapat diprediksi secara tepat. "Kami minta untuk segera mempersiapkan rencana lokasi itu. Supaya nanti saat pelaksanaan, sudah siap," pintanya. (Sni/Aha/Ayu)-f

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id



Berlangganan
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.